

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Kebakaran hutan diakibatkan pembukaan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar hutan gambut yang menghasilkan asap yang kemudian menghasilkan karbon. Kelapa sawit sendiri merupakan bahan utama dari minyak sawit, yang merupakan campuran bahan bakar solar yang digunakan oleh perusahaan untuk menggerakkan alat berat ataupun kendaraan yang membutuhkan tenaga dalam jumlah yang besar (bumn.go.id, 2018). Semakin besar permintaan minyak sawit, maka semakin banyak menghasilkan karbon akibat pembukaan hutan atau lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Karbon yang dihasilkan dari pembakaran hutan sendiri dapat memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan.

Pada akhir tahun 2019 lalu, tepatnya pada bulan September telah terjadi kebakaran hutan di Riau. Luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sejak Januari – September 2019 tercatat seluas 6,464 hektare. Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak berupa kabut asap yang menyelimuti setidaknya 12 kabupaten dan kota di Riau (Kompas.com, 2019).

Berdasarkan pada metodologi pemerintah Indonesia untuk memperkirakan emisi yang terkait dengan kebakaran lahan gambut adalah pengingat bahwa kebakaran yang dihasilkan dari aktivitas industri merupakan kontributor utama terhadap darurat iklim dunia (greenpeace.org, 2019). Indonesia adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keempat di dunia, sebagian besar disebabkan oleh kebakaran lahan gambut dan deforestasi yang masih terjadi dimana sebagian besar untuk menghasilkan komoditas seperti minyak sawit (greenpeace.org, 2019). Antara tahun

2015-2018, data menunjukkan pemasok Unilever bertanggung jawab atas akumulasi emisi gas rumah kaca setara 25% dari emisi yang dihasilkan Belanda dalam setahun. Pemasok Nestle bertanggungjawab atas lebih dari banyak emisi daripada swiss dalam setahun. Mondelez lebih besar dari emisi tahunan Selandia Baru. P&G dua kali lipat dari emisi tahunan Norwegia. Wilmar sebesar 80% emisi tahunan Singapura. Cargill lebih dari emisi tahunan Denmark. Musim Mas sebesar 75% dari emisi tahunan Singapura. Serta emisi gabungan Sinar Mas Group dan perusahaan mereka lainnya seperti Golden Agri Resource (GAR) dan Asia Pulp and Paper (APP) setara dengan hampir 3,5 kali lipat emisi tahunan Singapura (greenpeace.org, 2019). Kadar emisi karbon Indonesia pada tahun 2019 naik sebesar 0,6% dari tahun 2018 yakni sebesar 2,1%. Kadar emisi karbon Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 37 miliar ton karbon dioksida. (CNNIndonesia.com, 2019).

Indonesia melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon dengan mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* yang merupakan hasil meratifikasi Protokol Kyoto pertama pada 28 Juli 2004 (Halimah & Yanto, 2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca juga dikeluarkan oleh Indonesia sebagai dasar dalam pelaksanaan penurunan gas rumah kaca (Halimah & Yanto, 2018).

Penekanan terhadap gas rumah kaca salah satunya dengan melakukan pengungkapan emisi karbon. Bagian dari pengungkapan lingkungan merupakan didalamnya terdapat pengungkapan emisi karbon (Solikhah *et al.*, 2018). PSAK No. 1 (revisi 2019) menyebutkan mengenai pengungkapan lingkungan, terdapat dalam paragraf 14 yang berbunyi : “beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan keuangan, laporang mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan

dan kerika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.” (Amaliyah & Solikhah, 2019). Pengungkapan dan pelaporan informasi mengenai emisi karbon dimuat dalam Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, serta Perpres No. 71 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Namun, dikarenakan sifatnya yang sukarela, pengungkapan emisi karbon tidak dilakukan oleh semua perusahaan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Berikut tabel rata-rata pengungkapan emisi karbon perusahaan di Indonesia berdasarkan penelitian terdahulu :

Tabel 1. Rata-rata Pengungkapan Emisi Karbon di Indonesia

No	Peneliti	Tahun	Min	Max	Mean	Indikator
1	Titik Akhiroh dan Kiswanto	2016	1%	17%	7%	1,26
2	Desy Nur Pratiwi	2018	1%	4%	1.73%	0,3
3	Nanies Putri Halimah dan Heri Yanto	2018	0,06%	0,67%	0,24%	0,04

Sumber : Berbagai Penelitian

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan paling besar hanya 1,26 indikator dari total 18 indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam pengungkapan emisi karbon yang ada di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah.

Dari fenomena yang terjadi dapat dipastikan bahwa kesadaran mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan masih minim. Akibat dari minimnya kesadaran terhadap lingkungan tersebut yaitu masih banyak perusahaan di Indonesia yang enggan melakukan pengungkapan terhadap emisi karbon. Kurangnya kesadaran ini juga didukung dengan peraturan pemerintah yang belum mewajibkan setiap perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan terutama pengungkapan emisi karbon. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Telah

banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon, antara lain profitabilitas, efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan institusional.

Halimah & Yanto (2018) menyatakan bahwa perusahaan dengan *profitabilitas* yang rendah cenderung memfokuskan diri untuk memperoleh tujuan finansial dan meningkatkan performa dan cenderung mengesampingkan kepentingan untuk melakukan pelaporan keuangan. Lou *et al.* (2013), Megnan *et al.* (2015) serta Darus *et al.* (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan profit yang baik berkemungkinan melakukan pengungkapan terhadap lingkungan, salah satunya pengungkapan terhadap emisi gas karbon. Sehingga profitabilitas dari perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Desy Nur Pratiwi (2018), Prasetya & Yulianto (2018) serta Deantari *et al.* (2019) menyatakan bahwa perusahaan dengan profit yang kecil juga dapat melakukan pengungkapan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Trifvisa & Ardiyanto (2019) dan Kilic & Kuzey (2017) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah dari dewan komisaris pada suatu perusahaan, dapat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Berbeda dengan Akhiroh & Kiswanto (2016), Darus *et al.* (2019), Farida & Sofyani (2019) serta Amaliyah & Solikhah (2019) yang menyatakan bahwa jumlah dari dewan komisaris tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan terhadap emisi karbon. Sehingga dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Desy Nur Pratiwi (2017 & 2018) menyatakan bahwa besarnya saham pada suatu perusahaan dapat mendorong diungkapkannya emisi

karbon. Amaliyah & Solikhah (2019) yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap perusahaan akan membuat perusahaan terbuka dan melakukan pengungkapan emisi karbon. Sehingga kepemilikan konstitusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Berbeda dengan Akhiroh & Kiswanto (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan konstitusional tidak memiliki peran dalam meminimalisi konflik antara manajer dan *shareholder*. Sehingga kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan fenomena serta hasil penelitian-penelitian terdahulu maka akan dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dengan beberapa perbedaan. Pertama, periode penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu selama 1 (satu) tahun, sedangkan penelitian ini akan dilakukan selama 3 (tiga) tahun. Kedua, peneliti akan menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu profitabilitas, efektivitas dewan komisaris dan kepemilikan konstitusional. Ketiga, metode penghitungan untuk variabel dewan komisaris akan dilakukan berdasarkan indikator berupa 17 kriteria penilaian yang dikemukakan oleh Hermawan (2009) yang disusun berdasarkan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) pada tahun 2005 dan bukan dengan komposisi jumlah dewan komisaris.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
- b. Apakah efektivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
- c. Apakah kepemilikan konstitusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

### **I.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan emisi karbon.
- b. Mengetahui pengaruh efektivitas dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon.
- c. Mengetahui pengaruh kepemilikan konstitusional terhadap pengungkapan emisi karbon.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, serta memberikan bukti terkait teori keagenan dan teori legitimasi masih sesuai dengan konteks pada perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor pengungkapan emisi karbon. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referesi bagi pihak *agent* dalam membuat keputusan berkaitan dengan tanggungjawab manajemen sosial

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam melakukan penyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon dan gas rumah kaca.
- b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang tepat, yaitu perusahaan yang memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan.